

# PRAKTEK MENGENAL AKTOR/STAKEHOLDERS

Perkuliah ke 9  
DR NOVERMAN DUADJI

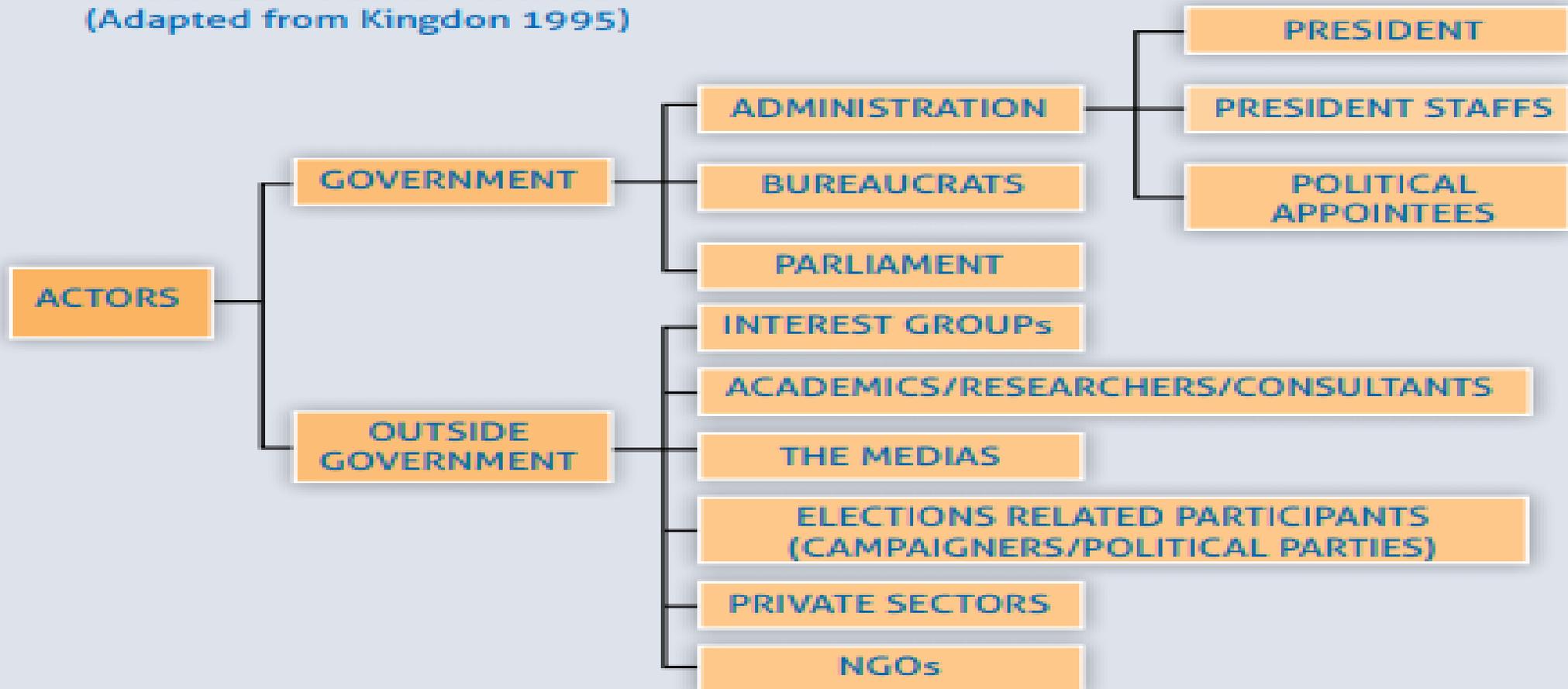
# APA ITU AKTOR?

Aktor dalam kebijakan publik dalam lingkup kebijakannya paling tidak dapat diidentifikasi dalam 3 jenis lingkungan kebijakan, yaitu:

1. Lokal, lingkup kebijakan bersifat lokal atau ada di tingkat daerah, yang sifatnya teknis dan erat kaitannya dengan isu-isu lokal, kebijakannya dapat merupakan turunan (teknis atau implementatif) dari kebijakan yang ada di atasnya (makro).
2. Nasional, lingkup kebijakannya secara nasional dan berupa penggarisan masalah-masalah makro strategis guna mencapai tujuan nasional, dalam situasi dan kondisi tertentu.
3. Internasional, lingkungan kebijakan yang luas, yang memiliki dampak terhadap lingkungan internasional (antar-negara). Isu yang diangkat berupa isu-isu global.

# AKTOR DALAM KEBIJAKAN PUBLIK

Aktor dari Jenis Institusi  
(Adapted from Kingdon 1995)



# 1. Government (pemerintah) sebagai aktor, merupakan pemeran strategis dalam proses kebijakan publik.

## Aktor dalam kelompok ini terdiri atas:

- a. Administrasi, secara umum aktor ini dapat diidentifikasi sebagai Lembaga kepresidenan (eksekutif), yang terdiri atas Presiden, Wakil Presiden, Kabinet, dan pejabat teras dalam pemerintahan. Aktor ini berada pada tingkat makro dalam suatu proses kebijakan publik atau bisa disebut juga sebagai policy maker tertinggi (pada tingkat nasional). Selain itu, peran Lembaga kepresidenan sangat penting dalam proses kebijakan karena mempunyai struktur yang kuat dalam melakukan rekrutmen para policy maker yang berasal dari lingkaran eksekutif (Kusumanegara, 2010)

Dapat dikemukakan bahwa aktor ini memiliki resources yang besar dalam proses kebijakan publik terutama dari segi sumber dana maupun kewenangannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa aktor dalam rumpun administrasi memiliki peran yang sangat strategis, terutama dalam hal perumusan kebijakan pada tingkat makro. Urgensi peran aktor ini dalam proses kebijakan publik dapat terlihat dari power dan resources-nya yang kuat.

# B. Birokrat

- ❑ ADALAH pihak dalam organisasi formal dan hierarkis (birokrasi).
- ❑ Terdapat berbagai definisi terkait birokrasi dari para ahli dengan berbagai perspektifnya, namun secara umum birokrasi dipahami sebagai organisasi yang memiliki struktur dan aturan-aturan yang jelas dan formal untuk mencapai suatu tujuan tertentu.
- ❑ Aparatur dalam birokrasi disebut sebagai birokrat. Birokrat merupakan pihak penting dalam proses kebijakan disebabkan keahlian yang mereka miliki, pengetahuan tentang institusi (sesuai dengan masa kerja), serta peran pentingnya dalam implementasi kebijakan (Kusumanegara, 2010).
- ❑ Birokrasi menjadi kekuatan utama dalam proses implementasi suatu kebijakan. Urgensi peran dan kemampuan birokrat dalam proses kebijakan publik menunjukkan strategisnya kewenangan birokrat khususnya dalam hal implementasi kebijakan publik, peran itu biasanya terlegalisasi dalam pola pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab.

## c. Parlemen

- ❑ Parlemen merupakan lembaga yang tidak bisa diabaikan dalam proses kebijakan disebabkan konteks politiknya dalam institusi terutama dalam menentukan rancangan kebijakan.
- ❑ Parlemen memiliki modal representativitas politik yang bisa digunakan untuk membentuk opini publik (Kusumanegara, 2010). Parlemen secara ideal menjadi manifestasi kedaulatan rakyat, tentu memiliki peran yang penting dalam proses kebijakan publik, terutama urgensinya dalam menjaga nilai-nilai demokrasi dalam konteks “penyambung lidah rakyat”.

## 2. Selanjutnya, Outside Government Actors merupakan aktor di luar pemerintah yang memiliki peran penting dalam proses kebijakan publik. Kelompok ini terdiri atas:

- a. Interest Group, yang didefinisikan sebagai asosiasi individu atau organisasi yang memiliki kesamaan perhatian/konsen, berusaha untuk mempengaruhi kebijakan dan biasanya dilakukan dengan melakukan lobi terhadap aktor pemerintah (Martini, 2012). Jenis interest group sangatlah beragam, ada sifatnya sementara dan ada pula yang permanen. Banyak interest group yang fokus dalam mempengaruhi kebijakan yang spesifik meskipun banyak pula yang lebih fokus pada kebijakan yang bersifat luas. Mekanisme kerja interest group dilakukan melalui eksekutif atau administratif, yudisial atau legislatif serta, opini publik ([www.pearsonhighered.com](http://www.pearsonhighered.com)).

Interest Group muncul dengan bermacam-macam motivasi seperti ekonomi (perusahaan perorangan atau kelompok), profesional (professional group seperti serikat buruh dan petani), public interest (pemerhati hak asasi manusia, pemerhati lingkungan dan lain-lain). Interest group dengan berbagai macam motivasi tersebut perlu dipastikan bahwa pengaruh yang dimiliki dapat dikontrol, transparan serta akuntabel sehingga tidak menimbulkan dampak negatif bagi society. Lobi-lobi yang biasanya dilakukan oleh interest group jangan sampai menimbulkan conflict of interest (Martini, 2012).

## b. Academics, Researcher, Consultant

- ❑ Seorang analis kebijakan atau pengambil kebijakan tidak mungkin bisa mengakses semua data yang dibutuhkan dalam memproduksi sebuah kebijakan publik yang efisien serta efektif.
- ❑ Peran dari seorang academics, researcher, consultant menjadi sangat penting untuk memberikan banyak preferensi dalam pengambilan kebijakan. Mereka biasanya memiliki akses yang besar terhadap data-data yang mampu memperkuat dasar pengambilan kebijakan.

## c. Media

- ❑ Dalam proses pengambilan kebijakan, media memiliki peran penting untuk dapat menghegemoni semua pihak untuk dapat konsen terhadap seluruh produk kebijakan.
- ❑ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, media merupakan alat atau sarana komunikasi seperti majalah, radio, televisi, film poster, spanduk (kbbi. web.id). Media dapat diklasifikasikan menjadi dua; pertama, media tradisional seperti televisi, radio, surat kabar, majalah dan lain-lain. Kedua, social media merupakan alat yang menggambarkan generasi baru media digital, komputerisasi, jaringan informasi, atau teknologi informasi.
- ❑ Dalam konteks kebijakan publik, media juga biasa digunakan sebagai sarana politik. Media bisa digunakan untuk mengarahkan publik untuk konsen pada isu tertentu. Media massa merupakan sebuah cara pemerintah untuk mendorong publik berpartisipasi dalam governance utamanya untuk menciptakan checks and balances

## d. Election Related Participants (Partai Politik)

- ❑ partai politik memegang peranan penting untuk menjaga eksistensi nilai-nilai demokrasi. Walaupun erat kaitannya dengan upaya meraih kekuasaan, tapi partai politik tetap memiliki peran penting dalam proses kebijakan publik.
- ❑ Menurut Winarno (2012: 133) dalam masyarakat modern, partai-partai politik sering melakukan “agregasi kepentingan”, partai politik berusaha untuk mengubah tuntutan-tuntutan tertentu dari kelompok-kelompok kepentingan menjadi alternatif-alternatif kebijakan.
- ❑ Aktor ini berperan penting dalam menggalang opini publik yang bermanfaat dalam melontarkan isu-isu yang nantinya dikembangkan dalam tahap agenda setting. Partai politik juga menjalankan fungsi-fungsi politik yang penting dalam proses kebijakan (Kusumanegara, 2010).

## e. Non Government Organization (NGO)

- ❑ NGO dalam kebijakan publik memiliki peranan advokasi, mekanisme kontrol terhadap kekuasaan, Secara umum, proses advokasi yang dilakukan NGO berada di keseluruhan proses kebijakan, yaitu: agenda setting, perumusan kebijakan, implementasi kebijakan, dan monitoring dan evaluasi kebijakan.
- ❑ Dalam formulasi atau perumusan kebijakan, NGO dapat memberikan input berupa informasi tentang pilihan-pilihan alternatif kebijakan. Pilihan ini dapat didasarkan dari kajian yang dilakukan NGO sebelumnya.
- ❑ Dalam fase implementasi kebijakan, NGO dapat melakukan advokasi dengan melengkapi peran pemerintah dan memberikan input dalam konteks yang sifatnya lebih operasional.
- ❑ Lalu dalam monitoring dan evaluasi, NGO dapat melakukan review atas pelaksanaan kebijakan. NGO juga dapat menjadi media antara roses di mana individu atau kelompok dan organisasi pemerintah dan masyarakat terdampak kebijakan untuk berkomunikasi tentang apakah dampak kebijakan publik sudah sesuai dengan harapan masyarakat.

## f. Private Sector

- ❑ Private Sector dapat dilibatkan dalam proses implementasi kebijakan.
- ❑ Keterlibatan private sector dalam proses kebijakan publik yang dilakukan pemerintah dikenal juga sebagai Public-Private Partnership.
- ❑ Tuntutan dilibatkannya private sector dalam siklus kebijakan publik didasarkan pada kenyataan bahwa pemerintah memiliki keterbatasan. Keterbatasan yang dimaksud adalah dalam hal sumberdaya, baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya finansial. Menurut

# TUGAS 2

Kebijakan pelarangan CANTRANG era Menteri Susi Pujiati, menuai Pro dan KONTRA, berujung konflik berkepanjangan, Menggunakan tehnik mengenal aktor, Siapakah aktor-aktor utama dan tidak utama dalam Pro Kontra Kebijakan pelarangan cantang?

PENDUKUNG/PENOLAK

+ **Table 1. Matrik Kepentingan, Sumberdaya & Pengaruh Stakeholders**

Stakeholders	Kepentingan	Sumberdaya	Pengaruh	Aksi
<b>Pendukung Kuat</b>				
Kementrian Kelautan dan Perikanan RI	Konservasi Alam khususnya biota laut	Aparatur Pemerintah dan Kebijakan	Sangat kuat dengan menggunakan kebijakan	Meneruskan kebijakan pelarangan cantrang
Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi/ Kabupaten/Kota	Menjaga ekosistem laut sesuai arahan pemerintah pusat	Aparatur Pemerintah dan Kebijakan	Sangat berpengaruh (perpanjangan kebijakan Pemerintah Pusat)	Melaksanakan kebijakan
UPT (Unit Pelaksana Teknis) PPI (Pangkalan Pendaratan Ikan) dan TPI (Tempat Pelelangan Ikan)	Pengembangan ekonomi perikanan	Penyediaan sarana dan prasarana bagi nelayan dan pelaku usaha perikanan	Sangat berpengaruh (kesejahteraan pelaku usaha perikanan dan nelayan)	Meneruskan kebijakan
Koperasi Perikanan	Meningkatkan perekonomian	Meningkatkan usaha-usaha kesejahteraan nelayan	Berpengaruh terhadap tingkat permodalan nelayan	Permodalan permodalan
Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Sumberdaya Perikanan	Pengawasan lapang bersama masyarakat dalam tatakelola perikanan bertanggungjawab	Hubungan dengan masyarakat dan pemerintah	Tinggi, Membuat laporan yang ditujukan ke DKP Provinsi dan Kabupaten atau Kota	Menerima, karena langsung mengawasi keadaan pesisir laut
Satpol Air	Menjaga keamanan kelautan, penegakan hukum dan pembinaan	Anggota POLAIR, Kapal Patroli	Tinggi	Menerima, mencegah keamanan, penyelundupan

Nelayan Tradisional Non Cantrang	Mendapatkan hasil tangkap ikan sebagai sumber ekonomi	Skill yang tinggi dalam melaut	Rendah	Menerima, ekosistem terjaga mendukung ekonomi nelayan
Nelayan Besar Non Cantrang	Menangkap ikan dengan jumlah maksimal untuk keuntungan maksimal	Alat tangkap ikan modern dengan kualitas tinggi	Ketertarikan rendah	Menerima kebijakan, bagian <i>stakeholder</i> yang pro dan mendukung
Asosiasi Korala Kerang dan Ikan Hias Indonesia	Menanggulangi isu pelanggaran pelestarian lingkungan khususnya koral, kerang, dan ikan hias	Kinerja anggota dalam kegiatan pelestarian lingkungan	Pengaruh kuat, interest kuat	Menerima, kebijakan ini dapat melestarikan lingkungan (khususnya coral, kerang dan ikan hias)
Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan	Untuk melatih para nelayan yang kurang skill terhadap ekosistem kelautan	Pelatih yang memiliki Skill	Tinggi, Menambah Ilmu Pengetahuan terhadap Nelayan	Memberikan Kontribusi terhadap kelangsungan para Nelayan

	ekosistem kelautan			Nelayan
<b>Penolak Kuat</b>				
Perum Perikanan Indonesia	Memperluas usaha budidaya, penangkapan ikan hingga pengolahan dan perdagangan ikan dan hasil laut lainnya	Edukasi maritim dan pengusaha jasa wisata	Tinggi	Menolak, hasil tangkapan nelayan berkurang maka pengolahan dan perdagangan ikan pun berkurang
Industri Pengolahan Ikan	Mengolah ikan menjadi olahan yang memiliki harga jual tinggi	Alat produksi yang memadai	Berpengaruh tinggi	Menolak, dengan adanya pelarangan cantrang karena mengurangi pendapatan
Bakul/Nelayan Pengepul	Mengumpulkan hasil tangkapan nelayan untuk kemudian dijual kembali ke distributor, pasar atau konsumen	Menjadi andalan bagi para distributor, pasar, konsumen untuk membeli hasil tangkapan laut	Interest tinggi , kekuatan kurang	Menolak, tetap mendukung nelayan dengan menggunakan cantrang agar tangkapan optimal
Dasa Wisma	Menjual hasil tangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi .	Memiliki kemampuan dalam mengelola ikan menjadi olahan yang bernilai tinggi.	Netral terhadap kebijakan	Menolak demi kepentingan menyuplai ikan
Buruh Sortir	Memilah antara tangkapan ikan-ikan kecil'sedang'dan besar	Mampu menjadi tenaga profesional dalam pemisahan tangkap perikanan.	Kurang Berpengaruh	Menolak kebijakan cantrang.
Service Kapal	Mempertahankan pendapatan pegawai karena sebagai mata pencaharian	Skill individu	Rendah	Menolak karena merugikan bengkel kapal
Langganan atau Juragan	Mendapatkan hasil tangkap ikan sebanyaknya unruk mendapatkan keuntungan	Memiliki kekuasaan untuk mendapatkan ikan dengan kekayaan.	Tinggi	Menolak, karena dianggap merugikan keuntungan pribadi
Pemilik Toko Sembako	Kesejahteraan Mereka Berkurang dengan adanya cantrang	Menyediakan Sembako	Rendah	Menolak karena merugikan pendapatan toko
Kementerian Koordinator Kemaritim dan Investasi	Menstabilkan investasi	Aparatur dan kebijakan	Pengaruh kuat interest kuat	Menolak, mengganggu investor/pengusaha ikan untuk berinvestasi

